

Relasi Perdamaian dan Pembangunan dalam Krisis Rohingya

Aditya Maulana Hasymi*

Abstract

The strength of a nation is strongly influenced by economic capacity. History prove that conflicts and wars occurs cause of the race for economic source of wealth. The emergence of economics as source of conflict has become an important discourse in peace studies. No exception to what happened in Rohingya, Myanmar. A case of civil conflict in Myanmar has surfaced internationally due to the turnaround from abuse of human rights issue to development conflict. This study wants to assess relations between the concept of peace and economic development in Rohingya crisis. The following question is central to this research: why mutual connection between peace process and economic development process emerge in case of Rohingya crisis? In approaching the main research question, this paper employs an analytical framework with core argument linked to the literature on capitalist peace theory. This paper will use qualitative method and library research to analyse factors of mutual connection between peace and economic development in Rohingya crisis. Through tracing process from several literatures, it is revealed the factors of mutual connection between peace and economic development in Rohingya crisis: first, economic motives in land grabbing by the military disturbed the stability of peace in Myanmar, and second, there is iniquity in development of rural communities in Myanmar by expelled the minority Rohingya.

Keywords: *Peace; development approach; Rohingya crisis; land grabbing*

Abstrak

Kekuatan dari sebuah negara amat terpengaruh dari kekuatan ekonominya. Sejarah membuktikan bahwa konflik dan perang terjadi dikarenakan persingan memperebutkan sumber kesejahteraan ekonomi. Kumunculan dari ekonomi sebagai sumber konflik telah menjadi hal penting dalam studi perdamaian. Tak terkecuali dengan apa yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Sebuah kasus konflik sipil di Myanmar yang menjadi kasus internasional karena adanya pergeseran isu dari etnis dan agama menjadi isu hak asasi manusia karena adanya pengambil alihan lahan secara paksa. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi antara konsep pendekatan pembangunan sebagai perdamaian dalam konflik Rohingya. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja pendekatan pembangunan (development approach) dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. tiga fokus kerangka kerja yang terdapat dalam pendekatan pembangunan (development approach) yaitu: pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi budaya; pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik harus dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik; dan ketiga, strategi dan perencanaan pembangunan sebagai perdamaian harus peka terhadap konflik dan bertumpu pada perdamaian.

Kata kunci: *perdamaian; pendekatan pembangunan; krisis Rohingya; ambil alih lahan.*

* Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta
adityahasymi@amikom.ac.id

Latar Belakang

Kekuatan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh elemen kapasitas ekonomi. Sejarah telah mencatat bahwa seringkali konflik dan peperangan terjadi diakibatkan oleh sumber ekonomi yang sangat vital meliputi emas, minyak, wilayah yang subur, hingga perairan strategis. Konflik dan peperangan yang tercatat dalam perkembangan studi hubungan internasional seperti misalnya dalam Perang Dunia I dan II yang amat fenomenal, terpicu oleh motif ekonomi. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Wilton Park, lembaga dari Inggris pemrakarsa serial dialog global sejak Perang Dunia II, menyatakan bahwa ada tiga hal yang akan menjadi penyebab utama terjadinya konflik di masa depan berupa: demografi, perubahan iklim, dan yang patut digarisbawahi- ekonomi (Banyu Perwita dan Sabban, 2014).

Munculnya konflik imbas dari pembangunan ekonomi menjadi wacana penting dalam kajian perdamaian. Tak terkecuali dengan apa yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Sebuah kasus yang bisa dikategorikan sebagai konflik sipil ini kemudian mencuat ke permukaan internasional akibat adanya penyelewengan terhadap hak asasi manusia yang kemudian berkembang menjadi konflik yang berkaitan dengan pembangunan. Satu

daerah yang diklaim sebagai daerah yang paling miskin di Myanmar, yaitu Rakhine State, menjadi titik dimana konflik bermula. Daerah tersebut merupakan daerah yang ditinggali oleh masyarakat minoritas dari Myanmar yang berasal kebanyakan berlatarbelakang islam sebagai muslim (Yegar, 2002). Penyimpangan hak asasi manusia terjadi akibat penindasan yang membuat suku Rohingya yang tinggal di Rakhine state terusir dan menjadi pengungsi di tanahnya sendiri (Parnini, Othman, and Ghazali, 2013).

Berawal dari tahun 2015, seturut bergulirnya waktu, kasus ini mengalami pergeseran isu. Kasus yang pada awalnya diduga bermotif sebagai penyelewengan hak asasi manusia, kini berkembang menjadi isu yang berlatarbelakang pembangunan ekonomi. Berdasar pada data yang dihimpun oleh Sassen (2017), telah terjadi ambil alih lahan secara paksa oleh junta militer Myanmar sejak medio 1990. Upaya ambil lahan tersebut tak terkecuali juga berimbas pada wilayah Rakhine State dengan eskalasi konflik yang terjadi pada 2012 (Sassen, 2017). Penduduk minoritas Myanmar dari suku Rohingya pun terusir dengan terkatung-katung sebagai pengungsi akibat tak kuasa berkonflik dengan junta militer Myanmar. Dari latar belakang yang telah disebutkan kemudian memunculkan pertanyaan riset sebagai

berikut: Mengapa terjadi saling keterhubungan antara konsep perdamaian dan pembangunan ekonomi dalam krisis yang menimpa kelompok Rohingya di Myanmar?

Penelitian ini memiliki state of the art dengan berdasar pada luasnya ilmu hubungan internasional. Mengutip dari McClelland (1969), sejatinya ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang multidisipliner, tak terbatas pada satu kajian saja, namun beririsan dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pembangunan yang dikenal dekat dengan disiplin ilmu ekonomi bersinergi dengan ilmu resolusi konflik dari ranah hubungan internasional.

Studi mengenai perdamaian yang memiliki kaitan dengan pembangunan bermula dari argumen Johan Galtung mengenai konsep keadaan damai. Hal tersebut diuraikan oleh Galtung (1969) dalam teorinya bahwa keadaan damai terjadi ketika kekerasan hilang atau tidak ada ditengah-tengah masyarakat. Secara lebih jauh kemudian Galtung (1969) menafsirkan kekerasan yang dimaksud dengan mengkategorikannya menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan personal dan struktural. Kekerasan personal melibatkan seseorang yang melakukan aksi yang terlihat dengan tujuan untuk melukai orang lain (Galtung, 1969). Kekerasan ini

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak personal manusia. Kekerasan struktural, masih menurut Galtung (1969), adalah kekerasan yang tercipta akibat ketidakseimbangan kekuatan struktural yang melibatkan kekuasaan. Kedua tipe konflik tersebut, baik personal dan struktural, menurut memiliki korelasi dengan proses pembangunan itu sendiri (Barnett, 2008).

Korelasi dari perdamaian dan pembangunan secara nyata tampak pada konflik struktural. Kasus seperti kelaparan dan kemiskinan terjadi akibat ketimpangan sosial yang melibatkan kuasa dari pemerintah (Barnett, 2008). Bentuk kekerasan yang terjadi dalam kekerasan struktural bersinggungan dengan kebutuhan dasar akibat adanya kekuasaan (Barnett, 2008). Di dalam studi pembangunan sendiri, nilai-nilai dari perdamaian menjadi elemen penting. Menurut Amartya Sen (1999), seorang ekonom pembangunan, seseorang akan merasakan pembangunan seutuhnya ketika mendapat kondisi yang bebas secara politis berdaya dalam sosial kemasyarakatannya, sehat secara rohani, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Perdamaian dan pembangunan juga dapat dikatakan saling berhubungan dengan elemen yang sama satu sama lain, yakni kebutuhan dasar (basic needs). Sebuah konsep yang dipaparkan oleh Sen tadi memberikan

indikasi bahwa pembangunan dapat terjadi dengan baik ketika sinergi antara sistem dan masyarakatnya mampu padu atau bisa dikatakan tak saling berkonflik (Barnett, 2008).

Pembahasan

Penelitian ini menyuguhkan argumen akan adanya unsur pendekatan pembangunan (*development approach*) dalam konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Argumen tersebut muncul dari data terkait yang telah dikumpulkan. Berdasarkan studi literatur dari data terbaru, di dapatkan data bahwa konflik yang melibatkan etnis Rohingya yang berlatar belakang muslim dan etnis Rakhine yang berlatar belakang Budha bukan hanya bermotif agama semata. Terdapat unsur pendekatan pembangunan (*development approach*) yang tercermin dari isu pengurusan lahan secara sepihak (Sassen, 2017). Dinamika konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar ini telah bergeser dari semula perilaku diskriminatif terhadap etnis minoritas Rohingya yang dianggap illegal (Waluyo, 2013).

Data yang didapat dari penelusuran literatur menunjukkan bahwa isu agama dan etnis hanya menjadi selubung kecil dari krisis yang terjadi di bagian Myanmar ini.

Sebuah laporan dari COHRE Country Report (2007) menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, krisis Rohingya tereskalasi akibat dari ambisi dari perusahaan besar untuk mengakuisisi lahan pertambangan, tak terkecuali dengan wilayah Myanmar. Ada peran dari junta militer Myanmar yang melakukan upaya mengambil lahan secara paksa tanpa kompensasi dari rakyat kecil, tak terkecuali etnis Rohingya, sejak tahun 1990 (COHRE Country Report, 2007). Ada upaya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar atas usaha merebut wilayah yang dihuni oleh etnis minoritas.

Upaya pengambil alihan lahan secara paksa, bahkan hingga berbuntut pada tindak kekerasan berupa persekusi, menunjukkan ketimpangan dalam perspektif pendekatan pembangunan (*development approach*). Kemunculan kepentingan ekonomi militer tampak lebih dominan daripada isu agama dan etnis dalam krisis Rohingya (Sassen, 2017). Hal ini bertambah jelas dengan adanya peraturan baru seputar hukum kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar pada medio 2012, yang nampak menguntungkan perusahaan besar (Woods, 2015). Perusahaan besar yang berlatar belakang para investor dari luar negeri menyerbu wilayah Myanmar, yang dianggap sebagai salahsatu negara di Asia

Tenggara yang memiliki wilayah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Tak bisa disangkal, hal ini berbuah menjadi konflik yang laten. Perusahaan luar negeri semakin gencar berinvestasi di Myanmar yang menjadikan jumlah pengambil alihan lahan makin banyak pula. Para minoritas, dalam hal ini etnis Rohingya, kemudian menjadi pihak yang semakin terdesak (Sassen, 2017). Kehadiran para investor asing menjadi pemicu meluasnya konflik di Myanmar.

Guna menganalisa studi kasus yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan pembangunan (development approach) dalam upaya penyelesaian konflik. Pendekatan pembangunan dalam perdamaian yang digunakan dalam penelitian ini didasari oleh cara pandang holistik dan universal terhadap kehidupan manusia (Triyono, 2007). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya tanpa terbelenggu oleh kekerasan, baik kekerasan struktural maupun kultural (Galtung, 1996). Perdamaian yang diupayakan oleh pendekatan pembangunan (development approach) berpijak pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar hidup manusia agar dapat terbebas dari belenggu kekerasan (Triyono, 2007). Adapun keputusan dan hak-hak dasar hidup manusia yang harus dipenuhi agar tercipta

perdamaian adalah: kesejahteraan, kebebasan, keamanan, dan identitas budaya (Galtung, 1980).

Pendekatan pembangunan (development approach) penting untuk menganalisis krisis di Rohingya karena mekanismenya yang menjadi pendekatan alternatif dari pendekatan pembangunan arus utama (mainstream development) untuk mengatasi sumber-sumber konflik dan kekerasan di masyarakat (Triyono, 2007). Pendekatan pembangunan dalam penyelesaian konflik ini juga berkelindan dengan apa yang terjadi di Myanmar, serbuan investor asing yang mengakibatkan pengambil alihan lahan secara paksa kepada etnis minoritas, sehingga mampu menjadi alternatif dari model pembangunan kapitalisme dan sosialisme (Hettne, 1983).

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan utama yakni: Mengapa terjadi saling keterhubungan antara konsep perdamaian dan pembangunan dalam krisis yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar? Guna menjawab pertanyaan riset tersebut, kerangka kerja pendekatan pembangunan (development approach) dalam penyelesaian konflik akan digunakan. Adapun ada tiga fokus kerangka kerja yang terdapat dalam pendekatan pembangunan (development approach) yaitu: pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk

membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi budaya; pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik harus dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik; dan ketiga, strategi dan perencanaan pembangunan sebagai perdamaian harus peka terhadap konflik dan bertumpu pada perdamaian (Triyono, 2007). Dengan menggunakan kerangka kerja tersebut, akan disintesis dengan krisis yang menimpa etnis Rohingya guna menemukan poin penting terkait saling keterhubungan antara perdamaian dan pembangunan.

Pertama, indikator kerangka kerja berupa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi budaya bersintesis dengan apa yang terjadi dalam konflik pengambil alihan lahan secara paksa. Etnis minoritas, dalam hal ini etnis Rohingya, menjadi terpinggirkan dikarenakan campur tangan investor asing dalam pengolahan lahan. Dengan didukung oleh pemerintahan junta militer, kaum Rohingya tak mendapat tempat lagi dan terjebak dalam kekerasan baik structural maupun kultural, serta pengusuran yang dekat dengan upaya alienasi budaya.

Kedua, indikator kerangka kerja pembangunan sebagai perdamaian berupa

pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik harus dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik tampak dalam lemah dengan tidak adanya struktur dan kelembagaan yang seharusnya diemban oleh pemerintah. Pemerintahan Myanmar, yang dalam hal ini berperan adalah junta militer, memberlakukan kebijakan diskriminatif berupa kebijakan asimilasi secara paksa dengan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar (Mitzy, 2014). Hal ini diperparah dengan kekejaman yang dipraktekkan oleh junta militer terhadap kaum Rohingya dengan memberlakukan pembatasan dalam kegiatan ekonomi dan berpindah wilayah (Mitzy, 2014). Terpampang jelas bahwa pemerintahan Myanmar tidak mampu menerapkan kerangka kerja pembangunan untuk perdamaian dengan luput menjalankan fungsi struktur dan kelembagaannya.

Ketiga, indikator kerangka kerja pendekatan pembangunan (development approach) dalam upaya penyelesaian konflik berupa strategi dan perencanaan pembangunan sebagai perdamaian harus peka terhadap konflik dan bertumpu pada perdamaian, akan sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada krisis Rohingya. Dari sisi internal, belum nampak ada inisiasi penyelesaian konflik berupa strategi perencanaan pembangunan. Inisiasi penyelesaian krisis Rohingya justru tampak

dari pihak eksternal, baik dari ASEAN maupun Non-Governmental Organization. ASEAN sebagai organisasi regional antar negara di Asia Tenggara ikut turun tangan menyelesaikan konflik Rohingya melalui salahsatu bagian, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, dalam upaya mengikis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat pengambil alihan lahan secara paksa kepada etnis Rohingya. AICHR berupaya menerapkan kerangka kerja pembangunan dengan melakukan pembahasan dengan para stakeholder dan proses edukasi serta diseminasi informasi tentang nilai-nilai hak asasi manusia (Saputra, 2019). Dapat terlihat bahwa unsur kerangka kerja pendekatan pembangunan (development approach) sebagai perdamaian hanya terlihat dari sisi pihak eksternal saja.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan sudah berupaya untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan keterhubungan konsep pendekatan pembangunan (development approach) dalam proses perdamaian dengan studi kasus krisis Rohingya, Myanmar. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam studi kasus konflik etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar terdapat keterhubungan dalam proses pembangunan dan perdamaian. Hal

tersebut diawali dengan argumen yang menggarisbawahi terjadi konflik yang melibatkan kaum Rohingya ini tidak murni menjadi konflik yang didominasi oleh isu etnis dan agama semata, namun melibatkan isu pembangunan yang dekat dengan sisi ekonomi, yakni berupa pengambil alihan lahan secara paksa dengan campur tangan pemerintahan junta militer dan investor asing.

Penelitian ini mencoba mensintesis biografi konflik Rohingya, Myanmar dengan kerangka kerja pendekatan pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik guna menemukan keterhubungan antara unsur pembangunan dan perdamaian. Ketiga kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi budaya; pembangunan dalam upaya penyelesaian konflik harus dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik; dan ketiga, strategi dan perencanaan pembangunan sebagai perdamaian harus peka terhadap konflik dan bertumpu pada perdamaian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Banyu Perwita, A.A & Nabila Sabban. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bakry, U.S. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Miles, M.B and Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. London.
- Yegar, M. 2002. *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of The Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*. Lexington Books. United States
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Anchor Books. New York
- Taylor, S.J, Robert Bogdan and Marjorie DeVault. 2015. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. Wiley. London.
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Obor. Indonesia
- Vromen, A. (2010). *Debating Methods: rediscovering Qualitative Approaches in Theory and Methods in Political Science*. Palgrave McMillan. United States

Jurnal:

- Barnett, J. (2008). *Peace and Development: Towards a New Synthesis*. Journal of Peace and Research. vol.45 no. 1, pp. 75-89
- Galtung, J. (1969). *Violence, Peace, and Peace Research*. Journal of Peace Research. vol. 6 no. 3, pp. 167-191
- Galtung, J. (1980). *Why the Concern with Ways of Life?* Institut Universitaire d'études du Development. Geneva

- Hettne, B. (1983). *Peace and Development Contradictions and Compatibilities*. Journal of Peace Research. Vol. 20 No. 4
- Mitzy, G.I. (2014). *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*. Global South Review. Vol. 1 No. 2
- Parnini, S.N, Muhammad Redzuan Othman & Amer Saifude Gazali. (2013). *The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations*. Asian and Pacific Migration Journal. vol. 22 no. 1, pp. 133-146
- Saputra, O.B. (2019). *Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya di Myanmar 2012-2016*. Journal of International Relations. Vol. 5 No. 1 pp. 946-957

Internet (karya individual):

- Sassen, S. (2017). *Is Rohingya Persecution Caused by Business Interests rather than Religion*. <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/04/is-rohingya-persecution-caused-by-business-interests-rather-than-religion>. Diakses pada 11 Maret 2019 pukul 17.45 WIB

Laporan:

- COHRE Country Report. (2007). *Displacement and Dispossession: Forced Migration and Land Rights in Burma*. Geneva
- Woods, K. (2015). *Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to Deforestation, Conversion Timber and Land Conflicts*. Forest Trends Report Series. United Kingdom